

TRADISIONALISME PESANTREN DI TENGAH ARUS PERUBAHAN

Mukodi

Dosen PBSI STKIP PGRI Pacitan
Email: mukodi@yahoo.com

Abstract:

Various problems arise and sunk in traditional boarding school, as if those adapted space and time. Study object of boarding school is always exciting to be revealed, because it always lives to grow and to metamorphose with the spirit of the time. The focus of this study is boarding school traditionalism, especially in the practice of traditional boarding school life among the current change. This study aims to unravel the current traditionalism landscape of boarding school education, as well as answer the various problems highlighting traditional boarding school cubicles. Students' receiving systems, learning systems, and management systems that are "completely traditional" to be the identity of traditional boarding school itself (salafiyah). There are four alternative solutions in order that the boarding school traditionalism even survives in the global era, namely to: 1) focus on specific skills, 2) develop entrepreneur; 3) graft schooling institution; 4) institutionalize its boarding school.

Keyword: boarding school (pesantren) traditionalism, traditional (salafiyah), and old-fashioned (jumud).

Dewasa ini, beragam persoalan tengah mendera sejumlah pesantren tradisional di Indonesia. Mulai dari masalah identitas diri pondok pesantren dalam hubungannya dengan kemandirian terhadap lembaga-lembaga lain di masyarakat; masalah jenis kependidikan yang dipilih dan dikelolanya; masalah pemeliharaan sumber-sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan pesantren itu sendiri; masalah antisipasi ke masa depan dalam hubungannya dengan peranan-peranan dasar yang akan dilaksanakan (Hasan, 2002: 59). Mukti Ali pun (1987: 9) mencermati lemahnya sistem pendidikan pesantren yang hanya menekankan pada aspek tertentu tanpa adanya keseimbangan, dan masalah metode pengajaran pesantren. Ia menga-

takan, "metodik dan dedaktik mengajar kurang, hal ini menyebabkan santri di pondok pesantren memerlukan waktu lama. Yang digarap dalam pondok pesantren hanyalah mencerdaskan otak dengan pelbagai macam pengetahuan dan penanaman akhlak mulia dengan pendidikan agama.

Selanjutnya M.M. Billah, seorang peneliti, menyoroti kelemahan pesantren, bahwa hubungan antar pesantren secara menyeluruh nyaris tidak terorganisasikan. Pada gilirannya hubungan akademis tidak terjadi, hal ini terlihat dari tiadanya standarisasi, baik tentang silabus, kurikulum dan bahan literturnya, maupun sistem penerimaan, promosi dan gradasi santri serta tataran ilmu yang diterima oleh santri (1985: 291). Namun analisis Billah tersebut, tentunya

tidak semua benar karena pesantren senantiasa mengalami dinamika yang masif (Ismail, 2002: 60). Bahkan, ada yang mensinyalir ketiadaan pelbagai aturan yang kaku dan *rigid* di pesantren merupakan identitas serta karakter pesantren itu sendiri. Praktis, jika identitas dan karakter itu dihilangkan justru kekhasan pesantren menjadi hilang.

Selain itu, persoalan klasik yang menarik untuk diungkap selanjutnya adalah tarik menarik kepentingan antara tetap mempertahankan pesantren sebagai institusi *salafiah* (tradisional), atau mengubahnya menjadi institusi *khalafiah* (modern), bahkan perpaduan keduanya, yakni pesantren terpadu (Lukers, 2010: 10, Zakasyi, 1998: 220). Konsistensi pesantren dalam menjaga nilai-nilai keaslian (*indigenous*) tradisional di satu pihak, dan merespon modernitas di pihak lainnya menjadi problem yang serius dari masa ke masa. Konflik tersebut, muncul sejak era kolonial Belanda, pra kemerdekaan,--tatkala Belanda memperkenalkan model pendidikan *volkschoolen*, sekolah rakyat, atau sekolah desa (*nagari*) dengan masa belajar selama tiga tahun di Indonesia sejak dasawarsa 1870-an yang pada gilirannya mempengaruhi model pendidikan Islam--, pasca kemerdekaan--diboyongnya model pendidikan Belanda ke bilik-bilik pesantren, seperti dibukanya sistem persekolahan, model pendidikan klasikal, praktek kepemimpinan demokrasi, dan model kelembagaan modern--, dan berlangsung hingga sekarang.

Di area itulah, artikel ini difokuskan pada tradisionalisme pesantren, khususnya dalam praktik kehidupan pesantren tradisional di tengah arus perubahan. Urgensi artikel ini adalah memberikan lanskap terkini tentang tradisionalisme pendidikan pesantren, sekaligus menjawab pelbagai problema yang menggelayuti bilik-bilik pesantren tradisional.

Tradisionalisme Pesantren

Pasca kemerdekaan, banyak pakar sosial keagamaan dan budaya memprediksi bahwa keberadaan pesantren tradisional tidak akan bertahan lama. Alasan mereka, kehidupan pesantren sangat lekat dengan *kejumudan* dan ketradision-

alan. Padahal, kehidupan selalu bergerak maju menuju kemapanan. Di antara pengkritik keras itu adalah Sutan Takdir Alisjahbana (1908-1994 M), ia sastrawan, sekaligus budayawan. Menurutny, sistem pendidikan pesantren harus ditinggalkan atau setidaknya, ditransformasikan sehingga mampu mengantarkan kaum muslim ke gerbang rasionalitas, dan kemajuan. Jika, pesantren dipertahankan, berarti mempertahankan keterbelakangan dan *kejumudan* kaum muslim (Madjid, 1997: xiii).

Namun, analisis Takdir tersebut tidak semuanya benar adanya, *kejumudan* dan *kekolotan* pesantren tradisional justru mampu mempertahankan dan meneguhkan pesantren dengan sederet kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Bahkan, alumni pesantren tradisional tidak sedikit yang berhasil menjadi publik figur di pentas nasional dan internasional. Sebut saja, Hadratus Syech Hasan Besari (1800-1862 M), Hadratus Syech Muhammad Khalil Bangkalan (1820-1928), Hadratus Syech Nawawi Banten (1815-1897 M), Hadratus Syech Saleh Darat (1820- 1903 M), Hadratus Syeich Asnawi Kudus (1861-1959 M), Hadratus Syech Abdur Karim Lirboyo Kediri (1856-1954), Hadratus Syech Mahfudz Tremas Pacitan (1868-1920 M), Hadratus Syech Hasyim Asyari (1875-1947 M), Hadratus Syech Bisri Sansuri Denanyar Jombang (1886-1980 M), Hadratus Syech Wahab Abdullah Tambakberas (1888-1971 M), Kiai Wahid Hasyim (1914-1953 M), Kiai Hamim Jazuli Ploso Kediri (1940-1993 M), Abdurrahman Wahid (1940-2009 M), Presiden Republik Indonesia ke IV dan banyak lainnya.

Tradisionalisme dalam pesantren sesungguhnya merupakan jati diri pesantren tradisional itu sendiri. Tradisionalisme yang dimaksud di sini bukan lagi merupakan kata sifat atau yang menunjukkan subyek perbuatan tertentu, melainkan sikap atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tradisi masa lalu (Bawani, 1993: 24). Tentunya tradisi masa lalu yang berbasis pada “pelestarian sesuatu yang dianggap baik, dan pengambilan hal baru yang lebih bermanfaat” (*al-muhafazha ‘al’a al-qodim ash-shalih wa al-akhdz bil al-jadid al-ashlah*).

Hal ini tercermin dalam praktik keseharian pesantren, baik prosesi pembelajarannya, maupun perilaku kehidupan warga pesantrennya (kiai, keluarga kiai, *abdi dalem*, santri dan masyarakat sekitar). Aktifitas tradisionalisme kehidupan pesantren di antaranya nampak pada prosesi berikut ini: 1) sistem penerimaan santri; 2) sistem pembelajaran; 3) sistem pengelolaan.

Sistem penerimaan santri. Tahun ajaran baru santri di pondok pesantren tradisional berbeda dengan dunia persekolahan pada umumnya. Di dunia persekolahan, tahun ajaran baru dipastikan sebagai ajang kontes, sekaligus ruang publikasi keunggulan sekolah masing-masing. Baliho, reklame, pamflet dan spanduk besar-besaran pun menghiasi lingkungan sekolah. Lebih dari itu, publikasi juga dilakukan melalui jalur audio visual, radio, televisi dan media masa. Lain halnya dengan pesantren tradisional, tidak ada publikasi layaknya dunia persekolahan. Praktis, baliho, reklame, pamflet dan spanduk tidak ditemukan di sekitar pesantren. Lazimnya, hanya papan-papan kayu sederhana yang bertuliskan nama pesantren tertempel, atau berdiri sepi di depan pesantren. Ukuran, warna dan tampilan papan identitas pesantren pun sederhana. Jauh dari kata mewah, apalagi berlebih.

Istilah penerimaan santri baru pesta perburuan santri dimulai, atau “proyek baru pesantren” tidak dikenal di dunia pesantren tradisional. Masuknya santri di pesantren tradisional berjalan apa adanya. Tanpa, adanya persiapan, dan perencanaan. Bahkan, santri keluar-masuk setiap saat, tanpa adanya syarat yang ketat. Penjahat sekalipun bisa menjadi santri. Karena setiap orang bisa menjadi santri, tanpa perkecualian. Tamu dan jamaah pengajian diterima setiap waktu, pagi, siang dan sore tidak diatur prosedural. Tidak berlebihan, jika pesantren tradisional dianggap tempat yang nyaman untuk berkeluh kesah tentang pelbagai hal. Baik, persoalan *duniawiah*, seperti kenakalan anak, perselisihan keluarga, dan himpitan ekonomi, maupun urusan *ukhrawi*, semisal; *ta’abudi*, *amaliyah* dan lain sebagainya.

Hanya saja sistem penerimaan santri yang terkesan tanpa sistem dan standar yang jelas

memunculkan pelbagai kelemahan. Kelemahan mendasar adalah heterogenitas *input* (penerimaan santri) berakibat pada buruknya proses pembelajaran, akhirnya berdampak pula pada rendahnya kualitas lulusan. Padahal, pendidikan yang baik (termasuk pendidikan pesantren), idealnya di mana *input*-nya heterogen, *process*-nya berkualitas dan *output*-nya homogen (standar). Namun, kenyataan ini tidak pernah terwujud,--kalau tidak dikatakan--gagal. Di arena inilah pendidikan pesantren seolah-olah tersandera dengan “dogma klasik” yang mana pesantren salafiyah laiknya bengkel keadaban masyarakat. Hal ini tentunya sangat baik, tapi kurang tepat. Alasannya? Jika, pesantren tetap melestarikan dogma klasik tersebut, tanpa diimbangi kualitas perencanaan dan proses pengajaran, pesantren akan selalu gagal dalam mewujudkan tujuan pesantren itu sendiri. Lahirnya kiai-cendikia dari rahim pesantren-pesantren tradisional pun, nampaknya harus diperjuangkan. Solusi alternatifnya, sistem penerimaan santri baru tetap harus dilakukan secara selektif agar dapat mereproduksi calon-calon kiai-cendikia, namun harus juga mengakomodir calon-calon santri “biasa” yang memiliki motifasi tinggi dengan beragam latar belakang yang dimilikinya.

Sistem pembelajaran. Model pembelajaran pesantren tradisional (*salafiyah*) biasanya dengan menggunakan sistem *wetonan* atau *bandongan* dan *sorogan*. Sistem *wetonan* merupakan metode pengajaran di mana santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang membacakan kitab tertentu, sementara santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan-catatan. Disebut dengan istilah *wetonan*, berasal dari kata *waktu* (istilah Jawa untuk kata: waktu), karena pelajaran itu disampaikan pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum atau sesudah shalat fardhu yang lima atau pada hari-hari tertentu. Karakteristik model *wetonan*, pengajian yang inisiatifnya berasal dari kiai sendiri, baik dalam menentukan tempat, waktu, maupun kitabnya (Madjid, 1997: 27).

Sedangkan *sorogan* adalah metode pengajaran individual, santri menghadap kiai seorang demi seorang dengan membawa kitab yang

dipelajarinya. Kiai membacakan pelajaran dari kitab tersebut kalimat demi kalimat, kemudian menerjemahkan dan menerangkan maksudnya. Santri menyimak dan mengesahkan (istilah Jawa: *ngesah*), yaitu dengan memberi catatan pada kitabnya untuk menandai bahwa ilmu itu telah diberikan kiai. Adapun istilah *sorogan* tersebut berasal dari kata *sorog* (Jawa) yang berarti menyodorkan, maksudnya santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai, sehingga terkadang santri itu sendiri yang membaca kitabnya di hadapan kiai, sedangkan kiai hanya menyimak dan memberikan koreksi bila ada kesalahan dari bacaan santri tersebut. Metode *sorogan* ini, nantinya akan memupuk kelekatan pertalian jiwa santri dan sang kiai. Inilah esensi dari metode privat *sorogan* di pesantren (Lombard, 2008: 131).

Harus diakui, bahwa efektivitas keberhasilan sistem *wetonan* atau *bandongan* dan *sorogan* dalam mewujudkan tujuan pendidikan pesantren masih diragukan. Keraguan metode tersebut, didasarkan pada indikator minimnya keberhasilan pesantren dalam mencetak alumninya menjadi “kiai kampung”, bahkan kiai-cendikia. Bahkan, seorang kritikus sosial budaya mengkritik bahwa jika ada 1000 santri di pondok pesantren yang berhasil tertempa menjadi kiai hanya satu, yang lain hanya menyumbang beli minyak tanah semata. Kritik ‘pedas’ itu tentu berdasar. Buktinya, tidak sedikit alumni pesantren tidak memiliki kematangan akademik. Ada dua asumsi kenapa hal ini terjadi. Asumsi pertama, karena sistem pembelajaran di pesantren terlalu egaliter dan tidak diimbangi pengawasan, sehingga santri seolah-olah bebas menentukan kehendak. Asumsi kedua, perkawinan model pembelajaran klasikal (modern) dan model *wetonan-sorogan* (tradisional) ternyata belum mampu membentuk habitus santri yang siap pakai di masyarakat. Di arena inilah sejatinya dua elemen dasar kelemahan model pembelajaran di pesantren.

Sistem pengelolaan. Pesantren tradisional di mana pun, biasanya mempunyai pola dan karakter pengelolaan yang relatif sama, yakni manajerial seadanya dan bergaya ‘tukang cukur’--tanpa administrasi yang jelas, serta tidak tertulis dengan baik. Kondisi ini merupakan salah satu

titik kelemahan pesantren. Hal ini dapat diamati secara nyata, diberbagai pesantren tradisional mayoritas tidak memiliki kemampuan membuat *data based* pesantren. Data jumlah santri, tempat santri berasal, biografi santri, alumni santri, jumlah ustad, tempat ustad berasal, keuangan pesantren, bahkan kekayaan pesantren pun tidak tercatat secara baik. Padahal, dikatakan bahwa *al-haqq bi-la an nizham yahlibuh al bathil bi an nizham* (sebuah sistem kerja usaha konstruktif yang tidak terkendali secara manajerial bisa dikalahkan oleh sistem kerja destruktif yang manajemennya tertata rapi).

Alhasil, pengelolaan pesantren tradisional dari waktu ke waktu relatif sama, yakni tidak ada perubahan yang berarti. Tetap menjadi lembaga *jumud*, tradisional, jauh dari kata modern. Manajemen pengelolaan, tata ruang, tata letak dan kelengkapan sarana prasarana masih menyedihkan. Memang ada sebagian pesantren tradisional yang adaptif dan responsif dengan semangat zamannya, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Ke depan, pesantren tradisional semestinya dikelola secara profesional, termasuk akuntabilitas, dan transparansi anggaran pun harus dikedepankan. Dengan demikian, pondok pesantren bisa menjadi model *streetipe* percontohan lembaga pendidikan, dan sosial keagamaan lainnya.

Gerbang Baru Pesantren Tradisional

Tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid (1985: 42) menyebut pesantren sebagai subkultur, Nurcholis Madjid (1997: 3) menyebutnya sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, Clifford Geertz (1995: 45) menyebutnya sebagai *cultural broker* dan Azyumardi Azra (1997: xxvi) menyebutnya sebagai pusat rehabilitasi sosial.

Pelbagai identitas yang tersemat pada diri pesantren tersebut, menegaskan bahwa peranan pesantren menjadi bagian yang tak terpisahkan (*inheren*) dari denyut nadi kehidupan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, kedekatan dan “keakraban” pesantren dengan masyarakat mulai renggang. Kerenggangan ini dipicu pada kegagalan pesantren tradisional dalam mengawinkan transformasi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat dengan doktrin *amar ma'ruf*

nahi munkar. Perbedaan orientasi tujuan kehidupan menjadi salah satu dasar perselisihan itu. Masyarakat berorientasi pada penghidupan *duniawiah* (*material oriented*), sedangkan pesantren lebih menitikberatkan penghidupan *ukhrawiah* (*transcenden*). Parahnya lagi, kegagalan kalangan pesantren dalam mengakomodasi keduanya justru mendorong pesantren membentuk “komunitas eksklusif” yang tidak mau lagi bersentuhan dengan masyarakat sekitar. *Alhasil*, pesantren yang semula dilahirkan oleh masyarakat, pada akhirnya tidak mampu lagi mengubah kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai yang ditawarkan. Lebih dari itu, di beberapa daerah telah tercipta hubungan yang tidak harmonis antara pesantren dengan masyarakatnya (Zuhri, 1999: 202). Persoalannya, apakah tradisionalisme pesantren tidak bisa lagi bertahan di era global?

Menjawab permasalahan tersebut, setidaknya ada empat langkah yang harus segera dilakukan oleh kalangan pesantren tradisional, yakni: *Pertama*, pesantren fokus pada keahlian khusus. Ibarat sebagai lembaga profit, pesantren di masa depan perlu menjajakan menu-menu yang benar-benar *khas*. Racikan kurikulum yang pas sang kiai diperlukan. Misalnya, di pesantren A menekankan pengajaran ilmu alat, *nahwu* dan *shorof* secara mendalam, pesantren B *consent* pada bidang ilmu bahasa Arab, pesantren C di bidang *fiqih*, pesantren D dibidang *tasawuf* dan seterusnya. Realitas seperti ini pada hakikatnya sudah dilaksanakan di pesantren, tapi pengelolannya sangat parsial dan sporadis. Masing-masing pesantren dengan jalan dan pemahannya menentukan konsentrasi keilmuannya. Hasilnya, antara pesantren satu dengan pesantren lain terjadi kesamaan bidang ilmu yang diajarkan, sehingga tidak ada kekhususan secara maksimal. Pola, karakter, dan gaya pesantren yang menampilkan keadaan yang *serba* seadanya ini disebut oleh para peneliti pesantren sebagai *keunikan* dan ciri khas pesantren itu sendiri.

Sebagai lembaga non formal, pengelola pesantren memang memiliki kemutlakan seluas-luasnya dalam mengelola pesantrennya, termasuk dalam menentukan konsep, arah dan tujuannya. Kiai sebagai pemilik tunggal pun dapat

membuat pelbagai kebijakan apa pun. Hal inilah akhirnya melahirkan ciri khas pesantren itu. Persoalannya, sampai kapan ini terjadi? Mungkinkah gaya ini dapat di rubah? Management pesantren yang lebih teratur, tersistem dan terorganisir merupakan langkah yang perlu diupayakan oleh para pengelola (kiai) pesantren. Lembaga pondok pesantren yang kebanyakan berada di naungan Nahdhatul Ulama (16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M) nampaknya perlu mencontoh *Jamiyyah* Muhammadiyah (8 Dzulhijjah 1330 H/ 18 Nopember 1912 M). Terutama, soal pengelolaan badan-badan yang berada dalam amal usahanya, termasuk Pesantren Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang lebih tua, Muhammadiyah menerapkan keteraturan administrasi dan pengelolaan atas seluruh amal usahanya. Berbeda dengan NU, badan otonomnya, tak terkecuali pondok pesantren cenderung bergerak tanpa komando, seadanya--kalau tidak dikatakan semau-nya--, sehingga *output* tidak terukur.

Padaahal, di era digital seperti ini, badan-badan otonom NU semestinya bisa lebih sinergi. Tidak ada lagi, adanya alasan kendala komunikasi, dan koordinasi, karena perkembangan teknologi informasi memudahkan semua itu. Gerak dan arah pesantren pun dapat didiskusikan secara bersama, misalnya dalam forum Ranting Nahdhatul Ulama tingkat desa, Majelis Wakil Cabang Nahdhatul Ulama (MWCNU), Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU), Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). Selain itu, dapat pula didiskusikan di *Rabitha Ma'ahid Islamiyyah* (RMI), di semua tingkatan, baik kabupaten, propinsi, maupun di tingkat pusat. Jika, hal itu terlaksana, niscaya pesantren-pesantren di Indonesia dapat berjalan lebih baik. Mengapa hal ini menjadi penting? Point penting atas jawaban ini adalah dimungkinkan ke depan pesantren-pesantren tradisional yang tidak mempunyai spesifikasi keilmuan, keahlian dan karakter tertentu tidak akan mampu lagi bertahan lebih lama, alias gulung tikar. Alasannya, gerak modernisasi berbanding terbalik dengan gerak inovasi pesantren tradisional. Tawaran spesifikasi keilmuan, karakter khusus, dan deferasi pesantren pun menjadi identitas pesantren yang bisa dijual di masa de-

pan. Sekaligus menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan pesantren dari kepunahan.

Kedua, pesantren mengembangkan *interpreneur*. Selain terciptanya identitas-identitas keilmuan tertentu di pesantren, jiwa kewirausahaan dan keterampilan usaha harus dihidupkan. Praktik wirausaha di pesantren sejatinya sudah berlangsung sejak lama di pesantren. Ada yang menumbuhkan jiwa kewirausahaan santri melalui model *penggarapan* sawah, budi daya ikan, perkebunan, koperasi pesantren, percetakan, dan pekerjaan *srabutan* di rumah sang kiai, keluarga kiai, serta masyarakat sekitar. Namun, pada umumnya hal itu dilakukan secara tradisional dan tidak semua santri dapat melakukan kegiatan seperti itu. *Alhasil*, para santri setelah meninggalkan pesantren bingung apa yang harus dikerjakan di rumah. Bekerja di bidang dakwah dan sosial agama segmentasinya terbatas. Sementara tuntutan hidup semakin mendesak, sehingga sebagian besar santri bekerja sebisanya. Ada yang menjadi ustad desa tanpa penghasilan, petani, pedagang, nelayan, pelayanan tokoh, dan tidak sedikit yang menjadi pengangguran.

Dalam konteks itu, pihak pesantren perlu segera melakukan inovasi dan terobosan atas *interpreneur deadlock* yang sudah menahun itu. Kerja sama dengan balai pelatihan dan diklat di SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) setempat bisa menjadi alternatif solutif. Sebut saja, melakukan MOU dengan dinas pekerjaan sosial, dinas perkebunan, dinas perhutanan, dinas perikanan, balai diklat, balai pelatihan dan sebagainya. Selain itu, dapat pula melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, LSM, pengusaha, dan perusahaan. Terobosan dan langkah semacam ini menjadi esensial, sehingga setelah lulus, atau keluar dari pesantren para santri sudah mempunyai bekal wirausaha. Paling tidak, mereka sudah mempunyai bayangan pekerjaan apa yang harus mereka tekuni, selain harus menjadi ustad. Jika hal itu terlaksana dengan baik, bukan tidak mungkin akan ada ribuan wirausaha muda di seantero tanah air yang berlatar belakang lulusan pesantren. Pembudidayaan wirausaha di pesantren pun dapat dijadikan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD), bahkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di arena inilah pesantren, pemerintah, pengusaha, dan LSM dapat bergandeng tangan secara sinergi untuk saling mengisi dan melengkapi.

Ketiga, pondok pesantren tradisional mencangkok lembaga persekolahan. Dengan bahasa lain, pesantren melegalkan sekolah umum di pondok pesantren. Gejala pendirian sekolah di pesantren sudah banyak dilakukan di berbagai pesantren tradisional di Indonesia. Sekadar contoh, di Pondok Pesantren Tremas ((1830 M), Pesantren Tebuireng Jombang (1899 M), Pesantren Ali Maksu Krapyak Yogyakarta (1910 M) dan Pesantren Lirboyo Kediri (1910 M). Pelembagaan sekolah formal, atau meretaskan sekolah umum di lingkungan pesantren sesungguhnya menjadi kebutuhan dasar pesantren itu sendiri. Kebutuhan ini semata-mata dikarenakan tuntutan modernisasi dan kebutuhan kehidupan santri. Santri harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan zamannya. Berdiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyyah/ Sekolah Dasar (MI/SD), Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama (MTs/SMP), Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMS/SMK) merupakan keniscayaan.

Adanya sekolah di lingkungan pesantren akan menambah kepercayaan para orang tua terhadap lembaga pendidikan Islam tertua ini. Orang tua, santri, dan calon santri tidak lagi *gamang*, akibat ketiadaan sekolah formal di pesantren. Tentunya tidak semua pesantren dapat mendirikan sekolah formal di lingkungan pesantren. Tergantung tingkat kebutuhan, kemaslahatan dan kemampuan finansial pondok pesantren. Tapi, pemahaman kiai akan pentingnya pengetahuan umum sejajar dengan ilmu agama, dan juga dorongannya kepada para santri agar mengakses sekolah umum merupakan kelaziman yang harus dijalankan. Dengan demikian, alumni pesantren dapat melanjutkan studinya ke tingkat berikutnya, baik ke perguruan tinggi agama; STAIN, IAIN, UIN, maupun ke perguruan tinggi negeri; UNY, UGM, ITB, IPB, UI dan lain sebagainya.

Point penting lain, terkait dengan dampak

positif dari pencangkakan sekolah formal di pesantren adalah alumni pesantren yang melanjutkan ke pelbagai perguruan tinggi disinyalir mempunyai kelebihan ganda, yakni sudah matang dalam kecerdasan religiusitas, dan tertanam karakter baik pada dirinya. Bahkan, H. A. Mukti Ali (1991: v) pernah mengatakan bahwa sistem pengajaran dan pendidikan Islam di Indonesia yang paling baik adalah madrasah (sekolah) dalam pesantren. Sistem ini dapat mengambil kebaikan sistem pengajaran madrasah dan kebai-kan sistem pendidikan pondok pesantren.

Keempat, pesantren tradisional melembagakan pesantrennya. Kefakuman pengganti kiai perintis dan gagalnya kaderisasi kiai muda (para *gus/ning*) adalah fenomena sejumlah pesantren dari masa ke masa. Gerak kemajuan dan *kejumudan* pesantren juga tidak lepas dari berhasil atau gagalnya pesantren memproduksi kiai-kiai muda. Kelemahan di sektor kaderisasi ini dapat dipecahkan dengan melembagakan pesantren menjadi berbadan hukum, berupa yayasan Islam. Pesantren pun tidak lagi milik pribadi, melainkan milik bersama (para pengurus yayasan pesantren). Tak terkecuali, kewenangan penanganan pengajaran, rekrutmen santri baru, pembangunan sarana prasarana, kelengkapan pembelajaran, dan eksistensi pesantren. Terlembaganya pesantren ini, berakibat pada berkurangnya otoritas personal sang kiai, melimpah pada kiai-kiai lainnya. Bahkan, terbagi pula dengan para pengurus yayasan. Oleh karena itu, tidak semua kiai (perintis/pewaris) mau melaksanakan kebijakan ini dengan berbagai pertimbangan.

Efek positif kebijakan pelembagaan pesantren ini sejatinya menjadikan pesantren lebih dinamis dan inovatif. Di samping itu, pesantren dapat lebih cepat berkembang, karena banyak tenaga dan sumber daya manusia. Transparansi keuangan pesantren (keuangan yang berasal dari donator) menjadi terukur. Namun, ada pula efek negatif dari terlembaganya pesantren menjadi yayasan, di antaranya; menurunnya militansi kepemilikan kiai (*gus/ning*, dan keluarga kiai)--karena tanggung jawab keberlangsungan pesantren bukan milik personal lagi, tapi kolektif--; pemilihan pengurus yayasan yang tidak tepat

menjadikan pesantren lamban bergerak berakibat pada lemahnya daya tahan pesantren; kekisruhan pengurus yayasan atas ide dan gagasan pengembangan berakibat pada ketidakterusan pesantren dan lain sebagainya. Jelasnya, keempat langkah tersebut di atas, merupakan salah satu solusi alternatif atas telaah agregatif pasca pencermatan dan perenungan terhadap perkembangan pesantren-pesantren tradisional belakangan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tradisionalisme dalam pesantren sesungguhnya merupakan jati diri pesantren tradisional itu sendiri. Sistem penerimaan santri, sistem pembelajaran, dan sistem pengelolaan pondok pesantren tradisional seharusnya berbasis realitas. Sistem penerimaan santri baru idealnya dilakukan secara selektif agar dapat mereproduksi calon-lalon kiai-cendikia, namun harus juga mengakomodir calon-calon santri yang memiliki motifasi tinggi dengan beragam latar belakang yang dimilikinya. Sistem pembelajaran di pondok pada umumnya terlalu egaliter dan tidak diimbangi pengawasan, sehingga santri seolah-olah bebas menentukan kehendak. Perkawinan model pembelajaran klasikal (modern) dan model *wetonan-sorogan* (tradisional) ternyata belum mampu membentuk habitus santri yang siap pakai di masyarakat. Pesantren tradisional harus dikelola secara profesional, termasuk akuntabilitas, dan transparansi anggaran pun harus dikedepankan. Setidaknya, ada empat solusi alternatif agar tradisionalisme pesantren bisa lagi bertahan di era global, yakni; 1) pesantren fokus pada keahlian khusus; 2) pesantren mengembangkan interpreneur; 3) pondok pesantren tradisional men-cangkok lembaga persekolahan; 4) pesantren tradisional melembagakan pesantrennya.

Saran

Agar keberadaan pesantren tradisional tetap menjadi bagian dari khasanah sistem pendidikan dan kebudayaan keindonesiaan, diperlukan pelbagai riset multi disiplin tentang pesantren. Hasil

kajian itu diharapkan dapat menjadi jendela informasi, sekaligus kritik-konstruktif bagi warga pesantren dari kalangan luar pesantren. Di titik perjumpaan inilah kalangan pesantren tradisional memerlukan beragam “wakaf ilmiah” tentang pesantren, muaranya agar pesantren tetap bertahan di tengah derasnya himpitan kompleksitas modernitas. Praktis, pelbagai riset pesantren menjadi keniscayaan teretaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti. 1991. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Azra, Azyumardi. 1997. “Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan”, dalam Nurcholish Madjid. *Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Bawani, Imam. 1993. *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Billah, M.M. 1985. “Pikiran Awal Pengembangan Pesantren”, dalam *Pergulatan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3M.
- Lukens Bull, Ronald. 2010. *Madrasa By Any Other Name Pondok, Pesantren, and Islamic Schools in Indonesia and Larger Southeast Asian Region*. Journal of Indonesian Islam. Surabaya: IAIN Ampel.
- Hasan, M. Nasihin, 1988. “Karakter dan Fungsi Pesantren”, dalam *Dinamika Pesantren*. Jakarta: P3M.
- Madjid, Nurcholish. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.
- Wahid, Abdurrahman. 1983. *Pesantren sebagai Sub Kultur*. Jakarta: LP3ES.
- Zarkasyi, Syukri. 1998. “Langkah Pengembangan Pesantren”, dalam *Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuhri, Saifuddin. 2012. *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.